

REINTERPRETASI ETNISITAS DAN RASIALITAS SEBAGAI KONSEP KETAHANAN SOSIAL (STUDI KASUS PERLAWANAN RONGGO PRAWIRODIRJO TAHUN 1810)

Akhlis Syamsal Qomar¹, Wardo², Akhmad Arif Musadad³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹akhliissyamsal9@student.uns.ac.id, ²warto13@staff.uns.ac.id,

³akhmadarifmusadad@staff.uns.ac.id

Abstract

The ethnic and cultural diversity of Indonesia sometimes becomes a disaster during the raise of racial and ethnicity sentiments, as it happened after the 1998 Reformation. Conflicts related to SARA (Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup) had emerged in many sectors and become a serious alerts to Indonesian that the ethnicity and racial tendencies can threaten social resilience. This article discusses the polemic of ethnicity and racism and its problem solving as a concept of social resilience through historical perspective. Specifically, this study is based on historical data on Madiun people's resistance led by Raden Ronggo Prawirodirjo III in 1810 which is abundant with moral values. This research used historical analysis method. The data source were primary and secondary sources in the form of the Yogyakarta Residency archives 1724-1903, babad, magazines, and other literatures. The research procedures included heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The research findings showed that Raden Ronggo Prawirodirjo III called on all groups of people, both Bumiputra (indigenous) and Timur Asing (Chinese) in eastern and coastal mancanegara, to take part in the resistance to Dutch colonialism from November 20, 1810 to December 17, 1810. These facts showed aspects of social resilience, including: 1) cultural resilience in the form of racial and ethnic diversity within a territory as a demographic bonus. 2) political resilience by unification of various ethnic groups for the same interest, resistance against colonialism. 3) social resilience as the common goal by prioritizing the national interest above individuals and groups interest. Apart from having common interests, Raden Ronggo saw that ethnic and racial differences did not necessarily become a barrier to unite against Dutch colonialism which threatened their social life. So that the paradigm regarding the issue of ethnicity and raciality points to chauvinism, but can be managed as a capital for social resilience in the life of the nation and state.

Keywords: social resilience, ethnicity-raciality, Madiun resistance.

Abstrak

Keragaman bangsa Indonesia yang tinggi merupakan sumbu yang mudah tersulut oleh konfrontasi-konfrontasi etnisitas dan rasialitas. Masalah etnisitas dan rasialitas bagi bangsa Indonesia menggejala secara kuat setelah era Reformasi 1998. Konflik yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) terjadi di banyak daerah dan menjadi peringatan serius bagi bangsa Indonesia bahwa masalah etnisitas dan rasialitas bisa mengancam ketahanan sosial. Artikel ini mendiskusikan masalah etnisitas dan rasialitas sebagai konsep ketahanan sosial berdasarkan data sejarah perlawanan rakyat Madiun yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawirodirjo III tahun 1810 yang kental akan

nilai-nilai. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder berupa arsip Residensi Yogyakarta 1724-1903, babad, majalah, dan pustaka berupa buku-buku. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan teknik studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis historis. Prosedur penelitian dilaksanakan meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Raden Ronggo Prawirodirjo III menyerukan kepada semua golongan masyarakat baik bumiputra maupun Timur Asing (Tionghoa) di wilayah mancanegara timur dan pesisir untuk turut serta dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada 20 November 1810 hingga 17 Desember 1810. Fakta-fakta tersebut menunjukkan aspek ketahanan sosial, antara lain: 1) ketahanan budaya berupa keragaman ras dan etnis dalam suatu wilayah sebagai bonus demografi. 2) ketahanan politik dengan penyatuan berbagai suku bangsa untuk kepentingan yang sama, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme. 3) ketahanan sosial sebagai tujuan bersama dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu dan kelompok. Selain memiliki kesamaan kepentingan, Raden Ronggo melihat bahwa perbedaan suku dan ras tidak serta merta menjadi penghalang untuk bersatu melawan penjajahan Belanda yang mengancam kehidupan sosial mereka. Sehingga paradigma mengenai isu etnisitas dan rasialitas mengarah pada chauvinisme, namun dapat dikelola sebagai modal ketahanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: ketahanan sosial, etnisitas-rasialitas, perlawanan Madiun.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Keragaman tersebut tercermin dari deferensiasi sosial dalam bentuk perbedaan etnis, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Menurut data Leo Suryadinata (Tilaar, 2004:113) setidaknya terdapat 20 suku bangsa besar di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2001, etnis Jawa adalah etnis terbesar jumlahnya 83,9 juta (41,7 %), kemudian disusul etnis Sunda 31 juta (15,4%), etnis Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis dan Banten yang masing-masing jumlahnya sekitar 4-7 juta atau 2%- 4.5%. Masyarakat Tionghoa merupakan etnis dengan jumlah warganya sebanyak 1.738.936 jiwa (0,86%).

Keragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan jika salah kelola maka akan menjadi sebuah musibah. Indonesia harus antisipatif dan responsif terhadap fenomena heterogenitas dengan arif dan bijak. Dalam satu sisi, perbedaan telah menimbulkan sisi negatif berupa konflik yang melanda negeri ini seperti yang terjadi dalam kasus konflik antar suku di Sambas Kalimantan Tengah, konflik dengan isu agama di Poso dan Maluku, gerakan separatisme Aceh dan kriminilisasi, persekusi, rasialisasi serta tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dialami oleh sebagian masyarakat Papua. Permasalahan terakhir terkait Papua, mungkin sudah biasa bagi bangsa ini karena sudah beberapa kali bangsa ini mengalami peristiwa serupa yang menyangkut permasalahan etnisitas dan rasialitas di wilayah Indonesia lainnya. Namun ironisnya Indonesia tidak pernah belajar dari sejarahnya.

Penggunaan stereotip “SARA” sebenarnya secara tidak sadar telah membatasi kita untuk berbincang dan membahas masalah etnisitas dan rasialitas lebih dalam. Permasalahan utamanya sebenarnya bukan terletak pada fakta

empiris secara genealogis antropologisnya, namun lebih kepada khasanah etnisitas dan rasialitas sebagai konsep berfikir. Masalah etnisitas dan rasialitas akan melahirkan konsep bermasyarakat yang nantinya bermuara pada sebuah titik temu, yaitu ‘ketahanan sosial.’ Ketahanan sosial merupakan sisi positif keberagaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Ketahanan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan, diantaranya kemampuan untuk mengelola sumber daya, perbedaan, kepentingan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat (Nuryana, 2002).

Ketahanan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia memiliki konteks historis yang khas. Salah satu peristiwa sejarah yang mengandung nilai-nilai dan konsep ketahanan sosial adalah perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III terhadap kolonialisme Belanda tahun 1810. Beberapa sejarawan pengkaji sejarah masa akhir tatanan lama Jawa telah menempatkan Raden Ronggo Prawirodirjo III sebagai tokoh lokal penting dalam dinamika Jawa. Mula-mula, kajian terkait Raden Ronggo dilakukan oleh salah seorang sejarawan terkemuka, yaitu Peter Carey, dalam disertasinya di Oxford (1976) yang telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855* (2012), yang menyebut Raden Ronggo sebagai inspirasi Pangeran Diponegoro dalam mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1825 hingga 1830, atau yang lebih dikenal sebagai Perang Jawa. Diponegoro sendiri mengakui demikian dalam babad yang dia tulis. Namun, kajian terkait Raden Ronggo dalam karya Peter Carey masih perlu dilanjutkan, sebab dia bukanlah figur utama dan nada episode sejarah yang belum diungkap secara gamblang dari sejarah Raden Ronggo, khususnya tentang bagaimana ia mengelola dan memanfaatkan perbedaan ras dan etnis dimasa dulu sebagai modal ketahanan sosial. Kajian selanjutnya oleh Sri Margana dan kawan-kawan dalam sebuah biografi politik Raden Ronggo yang berjudul *Raden Rangga Prawiradirja III Bupati Madiun 1796–1810: Sebuah Biografi Politik* (2018). Lagi-lagi kajian ini belum memberi potret lebih jauh bagaimana sejarah perlawanan Raden Ronggo dan kaitannya dengan konsep ketahanan sosial.

Dengan mempertimbangkan kajian terdahulu, penulis memandang aspek ketahanan sosial yang diusung oleh Raden Ronggo Prawirodirjo III dalam perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda tahun 1810 perlu mendapatkan perhatian mendalam. Realitas keberagaman yang ada di masyarakat Jawa pada awal abad ke-18 telah dipahami oleh Raden Ronggo sebagai konsep ketahanan sosial. Raden Ronggo berusaha melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda sebab kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial telah membawa dampak dan perubahan terhadap masyarakat Jawa ketika itu. Secara teoritis, sikap Raden Ronggo tersebut tidak lepas dari upaya mengatasi berbagai resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik (Roebyantho & Padmiati, 2007:34). Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini fokus untuk mengkaji reinterpretasi etnisitas dan rasialitas sebagai konsep ketahanan sosial dalam perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III terhadap kolonialisme Belanda tahun 1810. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana konsep rasialitas dan

etnisitas dalam perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III dan apa nilai yang bisa dipetik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi tahap *heuristik* yaitu fase dimana penulis harus mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Tahap kedua yaitu *kritik sumber* baik internal maupun eksternal. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui otentitas sumber. Tahap berikutnya yaitu *interpretasi*, fase dimana penulis melakukan penafsiran atas berbagai data yang telah tersedia. Kumpulan penafsiran (interpretasi) inilah yang kemudian dirangkai dalam suatu tulisan sejarah atau sering disebut *historiografi*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan politik untuk mendapatkan gambaran lebih jauh perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber tertulis yaitu berupa naskah dan arsip diantaranya: ANRI, Bundel Djokja Brieven”, (Dj Br) no. 193, 409 tentang perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III Tahun 1810; *Babad Bedhahipun Karaton Ngayogyakarta saha Kendhangipun PB VI* (Raden Ngabei Suradipura, 1913, Batavia: Balai Pustaka) Koleksi YASRI; *Babad Mangkubumi* (tanpa nama, 1981, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia & Balai Pustaka) diterjemahkan oleh Moelyono Sastronaryatmo; dan diperlukan sumber-sumber sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etnisitas dan Rasialitas

Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai dengan adanya fenomena baru, yakni disintegrasi negara nasional di satu sisi serta maraknya gerakan nasional yang berbasis etnisitas di sisi lain. Dalam konteks ini “etnisitas”, menurut P.L. Van den Berghe (1981:107-109), merupakan semangat keterkaitan komunitas yang sah-sah saja kehadirannya di panggung sejarah. Bagaimana negara-negara nasional, termasuk Indonesia, yang bercorak nasional- sentris ini menghadapi fenomena munculnya gerakan primordial yang berbasis etno-sentrisme, nampaknya perlu difahami juga masalah etnisitas ini dari berbagai perspektif.

Menurut Linnaeus dalam Wiriarmadja, paling tidak ada 4 ras berdasarkan lokasi geografisnya di planet bumi ini, yaitu: ras afer di Afrika, ras americanus di Amerika, ras asiaticus di Asia, dan ras europeanus di Eropa. Sedangkan Blumenbach, memberikan label pada ras itu berdasarkan pada warna kulitnya, yaitu: ras hitam seperti Ethiopia, ras coklat seperti Melayu, ras merah seperti Amerika, ras putih seperti Kaukasia, dan ras kuning seperti Mongolid (Wiriarmadja, 1992:87).

Bagaimanapun, ras merupakan pengkategorian dengan menggunakan baik konsep biologis maupun konsep sosial. Sebab, menurut Redfield dan Van den Berghe, walaupun secara umum orang cenderung memberikan ketentuan-ketentuan biologis kepada pengertian ras, namun batasan- batasan tentang ras itu sendiri merupakan hasil dari konstruksi sosial yang ditentukan berdasarkan persetujuan bersama. Mungkin karena kekaburan dalam

mendefinisikan tentang ras, maka banyak ahli sosiologi dan antropologi yang mengantinya dengan istilah etnik atau kelompok etnik. Alasan penggunaan istilah baru ini adalah selain didasarkan kepada karakteristik fisik, juga ciri-ciri kultural yang signifikan dipakai sebagai pembeda kelompok-kelompok tersebut (Wiriadmadja, 1992:88).

Sementara itu, dalam kaitan antara eksistensi etnisitas dan nasionalitas, para ahli menggunakan hukum alam dalam konteks Social Darwinism. Istilah Social Darwinism sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh tokoh Sosiologi, Herbert Spencer, pada abad ke-19 (Brinton, 1985:205-209). Dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa teori-teori ilmiah Darwin di bidang biologi bisa difahami, diinterpretasi, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan sosial. Dengan perkataan lain, istilah "*Social Darwinism*" sesungguhnya mengacu kepada kenyataan bahwa keberadaan dan kelangsungan hidup individu dan atau kelompok manusia mengikuti pola seleksi sosial yang dalam perkembangan selanjutnya hanya individu dan atau kelompok sosial yang kuat dalam perjuangan hidup yang akan tetap bertahan dan berkembang (Suwarta, 2005:64).

Bagi bangsa Indonesia sendiri, masalah etnisitas dan rasialitas ini menggejala secara kuat setelah era Reformasi (1998). Konflik yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) terjadi di banyak daerah dan pemerintah seolah-olah tidak berdaya menghadapinya. Kasus lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999 juga menjadi peringatan serius bagi bangsa Indonesia bahwa masalah etnisitas dan nasionalitas bisa mengancam integrasi nasional (Nurjaman & Kamsori, 2012:103-122). Begitu juga dengan masalah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang dalam banyak hal menyangkut kepentingan etnisitas dan rasialitas dengan pemahaman yang sempit.

B. Tinjauan Peristiwa Sejarah Perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III Tahun 1810

Untuk dapat memahami permasalahan etnisitas dan rasialitas sebagai sebuah konsep berfikir, penulis berupaya menyajikan sebuah data dalam peristiwa sejarah yang mana permasalahan etnisitas dan rasialitas yang selama ini kebanyakan orang anggap dan berfikir sebagai sebuah konsep yang sempit ternyata ketika ditelisik kebelakang permasalahan etnisitas dan rasialitas ini mampu dikesampingkan. Disini penulis berupaya mengkontruksi peristiwa lama yang kental akan nilai-nilai dan permasalahan etnisitas dan rasialitas di Jawa. Kali ini peneliti akan mengkontruksi "peristiwa perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III terhadap kolonialisme Belanda tahun 1810".

Masa pemerintahan Ronggo Prawirodirjo III sebagai Bupati Wedana Madiun bersamaan dengan kedatangan Daendels ke Jawa pada 1808. Daendels mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Daendels mengubah sistem administrasi negara dengan sistem eksploitasi kolonial baru yang memberikan keuntungan besar bagi negara induk (Marihandono, 2011:92). Ia juga merubah praktek feodal seremonial keraton kepada para penguasa pribumi dan membatasi kekuasaan mereka pada urusan-urusan tertentu serta menuntut agar pengelolaan hutan-

hutan jati milik Sultan di wilayah mancanegara wetan diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan kompensasi tahunan yang akan diberikan langsung kepada Sultan (Margana, 2018b:150).

Sultan Hamengkubuwono II menunjukkan sikap resisten terhadap kebijakan-kebijakan Daendels. Sikap yang sama ditunjukkan oleh menantu sekaligus penasihat politiknya yang menjabat sebagai bupati Madiun dan wedana bupati mancanegara wetan Yogyakarta, Raden Ronggo Prawirodirjo III. Sikap tersebut ditunjukkan oleh Sultan yang didukung penuh oleh Ronggo dengan tegas menolak proposal baru yang diajukan sang gubernur tentang tata cara penyambutan dan resepsi yang harus dilakukan di kraton apabila pejabat Belanda berkunjung. Proposal tersebut berisi usulan Daendels agar ia diperkenankan duduk sejajar dengan Sultan. Perubahan yang dilakukan oleh Daendels dirasakan oleh Sultan dan Ronggo sebagai bentuk campur tangan terlalu jauh pemerintah kolonial terhadap urusan internal keraton. Sehingga keduanya bersikeras menolak proposal Daendels (Carey, 2012:241). Dukungan Ronggo terhadap penolakan Sultan atas tuntutan Daendels tersebut telah menyeret dirinya dalam persetujuan lebih jauh dengan Daendels.

Daendels juga melayangkan tuntutan kepada Sultan agar pengelolaan hutan-hutan jati milik Sultan di wilayah mancanegara wetan diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan kompensasi tahunan yang akan diberikan langsung kepada Sultan. Kayu yang diambil dari hutan-hutan jati di wilayah mancanegara wetan tersebut nantinya digunakan demi kepentingan pembangunan infrastruktur pertahanan. Infrastruktur ini diantaranya perbentengan, kubu-kubu pertahanan, barak-barak pasukan, jembatan, parit-parit dan gudang-gudang kebutuhan perlengkapan militer. Khusus pembangunan benteng di Jawa Timur di Surabaya (Benteng Lodwijk) untuk melindungi pelabuhan Surabaya dan selat Madura merupakan proyek jangka panjang (“Bundel Djokja Brieven”, (Dj Br) no. 193).

Tuntutan Daendels tersebut sangat merugikan Kesultanan Yogyakarta. Raden Ronggo Prawirodirjo III yang menjabat sebagai Bupati Wedana Madiun membawahi 14 kabupaten di Mancanegara Timur yang menolak keras tuntutan tersebut karena wilayah yang dimaksud berada di wilayah kekuasaannya. Hal tersebut tentu saja tidak dapat diterima oleh para bupati wilayah timur yang tentunya bakal kehilangan sumber pendapatan yang sangat berharga berupa penyewaan hak menebang kayu kepada pengusaha Tionghoa dan Jawa dari daerah pesisir. Selain berdampak kepada golongan atas, pengambilalihan hutan wilayah timur oleh kolonial mengakibatkan banyak penduduk kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada sumber daya hutan. Sehingga dalam keputusan banyak penduduk yang memilih terjun ke dunia hitam dan timbullah berbagai macam pelanggaran di daerah perbatasan. Keributan tersebut terjadi antara penduduk yang hidup di daerah kekuasaan raja dan penduduk di daerah yang dikuasai Belanda. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Daendels secara teratur oleh para pejabat kolonial (Carey, 2012:249).

Ronggo sebagai Bupati Wedana Madiun yang membawahi wilayah Mancaegara Timur, dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut. Diponegoro dalam Babad Diponegoro (2016) menuliskan bahwa Bupati Wedana selalu dijadikan kambing hitam oleh Belanda dan sering diminta datang ke Semarang untuk mempetanggungjawabkan meningkatnya pelanggaran di daerah kekuasaan pemerintah Eropa. Atas tuduhan tersebut Ronggo diminta datang ke Bogor untuk meminta maaf secara langsung di hadapan Gubernur Jenderal.

Ronggo menyadari bahwa Daendels memang menginginkan kematiannya. Namun jika tidak memenuhi panggilan tersebut, Sultan akan menderita karena harus memenuhi keinginan Daendels. Ronggo memilih meninggalkan Yogyakarta, kembali ke Maospati dan menetapkan keputusannya untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Ronggo mengatakan bahwa ia akan melawan Daendels dengan bergerilya di wilayah Mancanegara Timur (Babad Mangkubumi, 1981).

Ronggo menulis surat tiga hari sebelum pelariannya kepada Notodiningrat dan Sumodiningrat yang berisi alasan perlawanannya. Walaupun surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan calon penerimanya (Carey, 2012:284), tetapi dapat memberikan wawasan tentang tujuan pokok Ronggo yaitu melawan pemerintah kolonial Daendels dan Sunan di Surakarta beserta orang-orang Jawa yang memihak pemerintah kolonial yang mengakibatkan perubahan dalam kehidupan rakyat di Jawa.

Pada tanggal 20 November 1810 Ronggo memproklamirkan perang melawan pemerintah kolonial. Ia berangkat menuju Madiun malam itu bersama dengan 300 orang pengikutnya. Sehari kemudian, 21 November 1810 Ronggo dan pengikutnya tiba di Kota Petik Maospati. Hanya seminggu sesudah Ronggo III memberontak, Sultan mengirim sebuah perintah rahasia kepada komandan pasukan gabungan Yogya-Belanda bahwa sekalipun Ronggo III tertangkap hidup-hidup, ia serta-merta harus dibunuh. Mengingat janji ayahandanya, Sultan tidak mau menanggung malu bila Ronggo III dibawa kembali ke Yogya dalam keadaan hidup. Menurut Danurejo II, Sultan Yogya mengingat janji ayahandanya, Sultan Mangkubumi kepada kakek Ronggo, panglima tentaranya selama Perang Giyanti (1746-1755), bahwa ia tidak akan pernah menyakiti atau menumpahkan darah keturunannya, dan jika mereka sampai melakukan pelanggaran, Sultan Mangkubumi senantiasa sudi mengampuni ("Bundel Djokja Brieven", (Dj Br) no. 409). Pasukan ekspedisi Yogya tersebut didampingi oleh seorang perwira Belanda, Letnan Thomas Paulus dan seorang bintangara Indo kelahiran Batavia, Sersan Lucas Leberveld, yang sebelumnya bekerja sebagai sais kereta Sultan. Keduanya akan memainkan peran yang menentukan dalam operasi militer terhadap Ronggo selama empat minggu berikutnya.

Pada tanggal 21 November 1810 di Semarang, Daendels dan panglima perang Van Broom membahas persoalan perlawan Ronggo. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Patih Danurejo II dan Residen Yogyakarta, Minister Engelhard. Rapat tersebut memutuskan untuk menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahtanya dan menggantinya

dengan putera mahkota, Pangeran Adipati Anom karena Sultan dianggap telah membantu dan melindungi perlawanan Ronggo. Rencana tersebut bisa dibatalkan jika ada tindakan nyata dan sungguh-sungguh dari Sultan untuk segera menangkap Ronggo (Margana dkk, 2018b:158-159).

Berdasarkan hasil keputusan tersebut, terpaksa Sultan segera mengirimkan pasukan kerajaan yang terdiri dari 1.000 prajurit infantri dan 12 prajurit kafaleri di bawah pimpinan Raden Tumenggung Purwodipuro yang dibantu dua ahli tempur Belanda yaitu Letnan Paulus dan Sersan Leberfeld untuk menangkap hidup atau mati Ronggo. Pihak Ronggo sendiri hanya terdiri dari 300 prajurit setia di bawah panglima perang Tumenggung Sumonegoro dan pasukan sukarela yang tak terhitung banyaknya (Margana dkk, 2018a:95).

Kurang dari sebulan setelah beberapa kali lolos dari pengejaran pasukan gabungan kerajaan dan pemerintah Belanda, Ronggo bersama pasukan akhirnya terdesak di Sekaran, dekat Bengawan Solo. Pada pagi hari tanggal 17 Desember 1810, pasukan Yogyakarta berhadapan langsung dengan pasukan Ronggo. Pertempuran tersebut mengakibatkan Ronggo beserta para panglima perang dan prajuritnya merengas nyawa akibat keserakahan kekuasaan kolonial Belanda. Jenazah Ronggo dan deputinya, Sumonegoro dibawa ke ibukota Yogyakarta dan dipertontonkan di Pangurakan sebagai penjahat yang dihukum mati. Kedua jenazah tersebut kemudian diturunkan untuk dimakamkan pada 22 Desember 1810 di komplek pemakaman kaum kraman di Banyusumurup arah tenggara Imogiri yang berbatasan langsung dengan Gunung Kidul (Carey, 2012:299-300).

Strategi gerakan Ronggo dalam melawan kolonialisme Belanda menarik yaitu dengan usaha memutus jalur-jalur logistik guna mencegah pasukan musuh mengikutinya dan tidak adanya diskriminasi antara golongan bumiputera dan Timur Asing. Ronggo memerintahkan prajuritnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap desa-desa di Surakarta yang dianggap kaki tangan Daendels. Ia dalam suratnya kepada Sumodiningrat menyarankan agar menghancurkan sejumlah jembatan di Kali Code dan Winongo di Yogyakarta dan jembatan di Kali Tuntang di atas jalan raya delapan kilometer utara Salatiga dengan tujuan menghentikan pasukan Daendels yang bergerak dari Semarang menuju Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan suatu pemahaman strategis tentang jalur-jalur yang bisa digunakan oleh Daendels untuk membawa masuk bala-bantuan militer guna menyerang Yogya dan mematahkan perlawanannya dari timur. ("Bundel Djokja Brieven", (Dj Br) no. 409). Upaya penghancuran jembatan-jembatan di akses penting tersebut merupakan strategi gerakan dengan usaha memutus jalur-jalur logistik (Babad Mangkubumi, Babad Bedhahipun Karaton Ngayogyakarta saha Kendhangipun PB VI). Strategi gerakan Ronggo tersebut tidak ditemukan dalam Perang Jawa.

Ronggo menghimbau ajakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial kepada semua golongan masyarakat baik bumiputera dan Timur Asing (Tionghoa) di Mancanegara Timur dan pesisir. Sebelum perlawanan itu, Ronggo menikmati hubungan akrab dengan masyarakat Tionghoa di Mancanegara Timur dan pesisir utama berkat kedudukannya sebagai kepala

penguasa persewaan gerbang cukai jalan untuk Sultan di wilayah Madiun. Ia curiga tentang ancaman yang ditimbulkan atas kepentingan perekonomian setempat, khususnya dalam perdagangan kayu, sebagai akibat dari kegiatan yang tidak pandang-bulu para penebang kayu serta pengusaha Eropa. Terdorong oleh perasaan khawatir, Ronggo melancarkan perlawanannya pada akhir November 1810. Ia menyatakan dirinya sendiri sebagai pengayom semua orang Jawa dan orang Tionghoa. “Ingkang kinuwasaaken angrayud serta angyomi tuwin atutulung ing kasusahaning titiyang bongsa Jawi utawi bangsa Cina.” (“Bundel Djokja Brieven”, (Dj Br) no. 409).

Perlawanan Ronggo juga mengandung cukup kuat semangat Ratu Adil yang menjadi salah satu ciri awal gerakan perlawanan di Nusantara. Ronggo benar-benar menggunakan gelar raja yang ia sandang, “Kanjeng Susuhunan Prabu Ingalogo” (“Yang Mulia Paduka Raja Pusat Sesembahan Yang Sedang Berperang”) sesuai dengan surat Pieter Engelhard kepada Daendels pada tanggal 24 November 1810 (“Bundel Djokja Brieven”, (Dj Br) no. 409). Perjuangan Ronggo menginspirasi Pangeran Diponegoro untuk melancarkan gerakan serupa yang lebih besar lima belas tahun kemudian dalam perang Jawa tahun 1825-1830.

C. Nilai yang Dapat Dipetik

Jika kita menelisik lebih dalam, maka kita akan menemukan hal menarik bahwasanya, perasaan senasib sepenanggungan akibat tekanan pemerintah kolonial Belanda membuat tumbuhnya dorongan bagi kedua etnis tersebut untuk membangun kerjasama demi menyelamatkan kepentingan bersama mereka. Menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2003), kerjasama timbul apabila orang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Kerjasama antara orang Jawa dan Tionghoa pada peristiwa perlawanan yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawirodirjo III pada 1810 dapat tumbuh karena adanya kepentingan bersama yakni kepentingan untuk membebaskan diri dari kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, orang-orang Jawa dan Tionghoa merasa memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup sehingga mereka berani untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Persamaan kepentingan serta ikatan kebersamaan yang telah terbangun sejak lama menjadi kunci akan solidnya persatuan pasukan Jawa-Tionghoa pada peristiwa peristiwa perlawanan yang dipimpin oleh Raden Ronggo Prawirodirjo III pada 1810 ini. Hal ini bisa dilihat dari sikap Raden Ronggo Prawirodirjo III yang menolak meminta maaf atas penolakannya terhadap tekanan dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Bersatunya kekuatan orang Jawa dan Tionghoa merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi pemerintah kolonial Belanda. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam upaya mencegah bersatunya kekuatan antara orang Tionghoa dan Jawa tersebut. Salah satunya adalah pemisahan pemukiman Tionghoa dari orang Jawa sehingga diharapkan bisa

memecah solidaritas mereka. Meskipun demikian, nyatanya kebersamaan antara Tionghoa dan Jawa dapat terus bertahan hingga akhir perlawanan.

Melangkah lebih jauh, selain karena adanya persamaan kepentingan, yang sebenarnya ketika berbicara mengenai permasalahan etnisitas dan rasialitas adalah bahwasanya kita tidak lantas harus berfikir secara sempit atau kaku mengenai paradigma permasalahan etnisitas dan rasialitas. Terbukti dalam tinjauan historis permasalahan etnisitas dan rasialitas masih bisa di negosiasikan.

SIMPULAN

Sejauh ini pengumpulan terkait permasalahan etnisitas dan rasialitas di Indonesia masih dipandang dengan paradigma yang kaku dan sempit. Berkaca pada sejarah perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III terhadap kolonialisme Belanda tahun 1810, permasalahan etnisitas dan rasialitas masih bisa di negosiasikan sebagai konsep ketahanan sosial. Sikap perlawanan Raden Ronggo yang mengajak ikut serta masyarakat Jawa dan Tionghoa tersebut tidak lepas dari upaya mengatasi berbagai resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik akibat kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda di berbagai bidang.

SARAN

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah anugrah yang jika salah mengelola maka akan menjadi musibah, sehingga diperlukan telaah secara komprehensif terkait keberagaman bangsa Indonesia. Sebuah kajian tentang keberagaman bangsa bukan hanya dapat memberikan gambaran komprehensif. Namun, lebih dari itu dapat menumbuhkan dialog persepsi kerukunan etnisitas dan rasialitas di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Babad Bedhahipun Karaton Ngayogyakarta saha Kendhangipun PB VI
- [2]. Babad Mangkubumi
- [3]. Brinton, Crane, 1985, "Sejarah Intelektual" dalam Taufik Abdullah & Abdurrachman Surjomihardjo [eds]. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif, PT Gramedia, Jakarta.
- [4]. "Bundel Djokja Brieven", (Dj Br) no. 193, 409.
- [5]. Carey, Peter, 2012, Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- [6]. Margana, Sri dkk., 2018, Raden Ranga Prawiradirja III Bupati Madiun 1796-1810: Sebuah Biografi Politik, Pemkab Madiun & Departemen Sejarah FIB UGM, Madiun.
- [7]. Marihandono, Djoko dan Harto Juwono, 2008, Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa, Banjar Adi Production, Yogyakarta.
- [8]. Nurjaman, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori, 2012, "From Bullet to the Ballot: A Case Study of the East Timor's Referendum as Viewed by

- Newspapers of Kompas and Republika in Jakarta” dalam TAWARIKH: International Journal for Historical Studies, Vol.5(1) Oktober.
- [9]. Nuryana, Mu'man, 2002, Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Balatbang Depsos. RI, Jakarta.
- [10]. Roebyantho, H. & Ety Padmiati, 2007, “Pemberdayaan Jaringan Pranata Sosial dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan” dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12.
- [11]. Suwirta, Andi, 2005, Sejarah Intelektual: Percikan Pemikiran dari Dunia Barat dan Islam, Historia Utama Press, Bandung.
- [12]. Tilaar, H.A.R., 2004, Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, Grassiondo, Jakarta.
- [13]. Van den Berghe, P.L., 1981, The Ethnic Phenomenon, Elsevier, New York.
- [14]. Wiriaatmadja, Rochiati, 1992, “Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional”, Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan, Program Studi Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Pascasarjana IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung, Bandung.